

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- BNN. 2016. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif. 2012. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hidayatullah, Syarif. 2015. "Narkoba Dalam Perspektif Agama dan Filsafat". *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Iqbal, Muhamad, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jamilah, Fitrotin. 2014. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Dunia Cerdas.

- Lestari, Sri, dkk. 2019. *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Yogi. 2016. *Diktat Hukum Pidana*. Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujono, A.R, dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsyah, Tn. 2011. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: PT Alumni.
- Wirasila, Anak Agung Ngurah, dkk. 2017. *Tindak Pidana Narkotika dan Penanggulangan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yudianto, Arifin, dkk. 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs)*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Jurnal dan Publikasi lain:

- Afifah, Wiwik. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Pebruari 2014. Vol. 10. No. 19.

- Alwin Ahadi, Lalu M.. 2022. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”. *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022.
- Setiawati, Ni Made Febby dkk. 2023. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 1 Agustus 2023.
- Gita Santika Ramadhani. 2012. “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”. *Diponegoro Law Review*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2012.
- Hafied Ali Gani. 2015. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Malang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Hidayatun, Siti dan Yeni Widowaty. 2020. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.1 No.2.
- Lubis, Muhammad Ridwan, dkk. 2020. “Faktor Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”. *Prossiding Seminar Hasil Penelitian 2019*. Diselenggarakan di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan 01 Oktober 2020.
- Luh Nyoman Alit Aryani. 2018. *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza*. Denpasar: Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Nurlatifah, Ai, dkk. 2022. “Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Mahasiswa”. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2 No.10 Maret 2022.

Priambodo Adi Wibowo. 2015. *Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem*. Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rahmat, Rahmat dan Fadli, Muhammad. 2016. “*Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia (Zero Burning Policy Reformulation On Indonesia Land Clearing)*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 NO. 01 - Maret 2016 : 85 – 96.

Siregar, Rospita Adelina. “Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya”. *Jurnal Comunita Servizio*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).-

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

